



**Judul** : Perempuan Harus Isi Posisi Pembuat Kebijakan  
**Tanggal** : Sabtu, 07 Mei 2016  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

## Perempuan Harus Isi Posisi Pembuat Kebijakan

ANGGOTA Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR, Amelia Anggraini, menyerukan peningkatan peran perempuan dalam demokrasi prosedural. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Women in Parliament Global Forum di Amman, Yordania, Rabu (4/5).

Menurut Amelia, stigma maskulinitas untuk jabatan-jabatan publik masih kencang sampai saat ini sehingga kesempatan perempuan dalam politik masih dianggap sebelah mata.

Di depan delegasi berbagai negara, politikus dari Jawa Tengah itu menekankan perempuan modern harus

memegang posisi strategis sebagai pembuat kebijakan. Kompleksitas persoalan perempuan terkait sektor ekonomi, sosial, politik, hingga urusan rumah tangga, menurutnya, hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan 'berwajah' perempuan.

Isu perempuan memang menjadi tema besar dalam agenda Women in Parliament. Amelia menyinggung kurangnya partisipasi perempuan Indonesia dalam politik. Peraturan mengenai kuota 30% perempuan dalam pemilihan legislatif masih menjadi polemik.

"Tidak ada sanksi yang tegas bagi

partai politik yang tidak mampu memenuhi kuota 30% perempuan itu. Selain itu, banyak perempuan politikus mendapat nomor-nomor urut di level bawah. Padahal, posisi itu tidak seksi bagi pemilih," ungkap politikus Partai NasDem tersebut, dalam siaran pers yang diterima *Media Indonesia*, kemarin.

Berdasarkan pengalamannya, lanjut Amelia, para perempuan politikus juga selalu ditempatkan di komisi-komisi yang dikatakan lebih cocok untuk perempuan, seperti Komisi VIII (sosial dan agama), Komisi IX (tenaga kerja), dan X (pendidikan

dan budaya). Padahal, pada saat bersamaan, perempuan semestinya berkontribusi pada komisi lain yang dianggap 'ranah pria'.

"Nyatanya, sekitar 40,8% perempuan ditempatkan di Komisi IX, sedangkan di komisi lain bisa jadi di bawah 20%," imbuh Amelia.

Tantangan lain untuk meningkatkan representasi perempuan ialah mendorong perempuan menduduki jabatan di lembaga peradilan dan eksekutif. Dengan begitu, perempuan akan memiliki peran besar dalam memajukan daerah dan menegakkan supremasi hukum. (RO/P-1)